BPBATAM

BADAN PENGUSAHAAN BATAM

LAKIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Tahun 2016

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

BADAN PENGUSAHAAN BATAM

LAKIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Tahun 2016

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

Kata Pengantar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT dengan telah tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016 Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, atau disebut juga Badan Pengusahaan Batam (BP Batam), yang juga merupakanperjalanan tahun kedua dari Renstra Tahun 2015-2019.

Penyusunan LAKIP ini menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik IndonesiaNomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 19 Tahun 2013 tentang Prosedur Perencanaan Dan Penganggaran; serta Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2016.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 Badan Pengusahaan Batam juga menguraikan pencapaian kinerja tahun sebelumnya dan juga merupakan media pertanggungjawaban keberhasilan dan/atau beberapa kinerja yang belum tercapai secara maksimal dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam pencapaian visi dan misi organisasi sesuai Rencana Kinerja yang telah ditetapkan.

Substansi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai instrumen untuk menginformasikan pencapaian kinerja Badan Pengusahaan Batam dalam tahun 2016 yang menyangkut tentang proses pencapaian tujuan dansasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja tahun 2016, yang sekaligus merupakan laporan akuntabilitas kinerja Badan Pengusahaan Batam merupakan mata rantai pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya.

Dengan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2016 Badan Pengusahaan Batam ini kiranya dapat memberikan informasi yang akurat, tepat, relevan, dan transparan, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengambil manfaat dan menilai pencapaian kinerja Badan Pengusahaan Batam dalam kurun waktu satu tahun di tahun 2016.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga tersusunnya LAKIP tahun 2016 ini, semoga bermanfaat dan berguna untuk pelaksanaan tugas-tugas dan semakin memacu kinerja Badan Pengusahaan Batam di masa yang akan datang.

Kami menyadari dalam pembuatan dan/atau penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2016 ini masih ada beberapa kesalahan dan kekurangan yang akan kami perbaiki dengan komitmen penuh dari seluruh *stakeholders* dan komponen yang ada di Badan Pengusahaan Batam.

Batam, 26 Februari 2017

Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

Hatanto Reksodipoetro

Ringkasan Eksekutif

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Tahun 2016 menyajikan keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang telah direncanakan.

Capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama(IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Pengukuran kinerja (keberhasilan dan kegagalan) dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan.

Pengukuran indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas.

Beberapa capaian utama kinerja tahun 2016 adalah sebagai berikut

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama BP Batam	Target 2016	Realisasi 2016	%
Menjadikan Batam sebagai Kawasan Investasi yang Berdaya Saing di Asia Tenggara	1 Memantapkan pengelolaan kawasan investasi yang profesional	1 Meningkatkan peran kelembagaanyang profesional dalam mengantisipasi persaingan ekonomi dan perdagangan global.	1.1 Terwujudnya aturan dan regulasi yang berpihak pada pengembangan investasi.	1.1.1 Presentase jaminan kepastian hukum dalam berinvestasi di KPBPB Batam	57	63	62%
			1.2 Terwujudnya profesionalitas dalam manajemen pengelolaan yang menerapkan prinsip *good governance* dan *good corporate governance*	1.2.1 Tersusunnya *road map* reformasi birokrasi di KPBPB Batam	100%	0	0%
				1.2.2 Persentase peningkatan akuntabilitas kinerja di BP Batam.	100%	100%	100%
	2 Mewujudkan kawasan investasi yang memiliki infrastruktur yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	2 Menjaring dan mengembangkan kawasan investasi dalam sektor industri, perdagangan dan pariwisata yang berbasis Teknologi, Informatika dan Komunikasi (TIK)	2.1 Tercapainya target realisasi nilai investasi dari 8 fokus industri	2.1.1 Nilai investasi real di 8 fokus industri yang dikembangkan KPBPB Batam tercapai sejumlah 2,9 Milyar USD di tahun 2019	USD 400.000.000	USD 471.368.000	118%
				2.1.2 Waktu pelayanan perijinan investasi 15 hari	4 hari	3 hari (IP)	125%
		3 Mengembangkan sarana prasarana kepelabuhanan yang berstandar internasional	3.1 Tersedianya sarana prasarana kepelabuhanan yang menghubungkan simpul jasa kawasan investasi yang berstandar internasional	3.1.1 Target pendapatan pelabuhan laut tercapai Rp 1,8 Triliun di tahun 2019	Rp1.400.000.000.000	Rp2.007.267.067,80	112%
				3.1.2 Waktu pelayanan bongkar muat barang dan kontainer pelabuhan laut max 7 hari	4 hari	3 hari	125%
				3.1.3 Target pendapatan bandara tercapai Rp1,1 Triliyun di tahun 2019	Rp125.384.000.000	Rp172.172.126.062,95	140%
				3.1.4 Waktu pelayanan bongkar muat barang kontainer dan kargo bandara Hang Nadim max 40 menit	30 menit	30 menit	100%
	3 Mewujudkan	4 Mengembangkan	4.1 Tercptanya kawasan	4.1.1 Target pendapatan	Rp95.717.000.000	Rp62.510.419.831,10	65%

	kawasan investasi yang berwawasan lingkungan	pengelolaan lingkungan hidup dikawasan-kawasan investasi yang berwawasan lingkungan	investasi yang sehat dan berwawasan lingkungan		Rumah Sakit tercapai Rp887 milyar di tahun 2019			
				4.1.2	Target pendapatan Kantor Air tercapai Rp466 milyar di 2019	Rp27.744.000.000	Rp30.993.864.202	112%
				4.1.3	Terjaganya kualitas udara dan air yang baik	Minimal Class 3 (Skala 1-4)	Class 3	100%
							Rata-rata capaian kinerja	97%

Tabel Alur Visi – Misi – Realisasi 2016

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tahun 2017 dengan jumlah keseluruhan sasaran sebanyak 5 (lima) sasaran dengan 12 indikator kinerja utama, kategori capaian sasaran sebesar **97%**.

Kategori pencapaian sasaran tahun 2016 cukup sesuai dengan yang diharapkan karena belum sepenuhnya sesuai dengan yang direncanakan. Kendala yang mempengaruhi/menghambat pencapaian sasaran, antara lain

a. Hambatan eksternal yang dominan dan sangat mempengaruhi capaian kinerja sesuai yang telah direncanakan, misalnya
   1. Peraturan Pemerintah tentang pembagian tugas yang jelas antara BP Batam dengan Kementerian Perhubungan didalam mengelola dan penyelenggaraan kepelabuhanan saat ini masih dalam proses;
   2. Masih kurang optimalnya koordinasi antarlembaga.
b. Hambatan internal yang cukup mempengaruhi capaian kinerja adalah sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan lagi kualitasnya, kompetensi dan profesionalismedalam pelayanan.

Berbagai permasalahan atau kendala tersebut di atas diusahakan untuk diatasi atau paling tidak dikurangi tingkat pengaruhnya agar tidak menghambat pencapaian sasaran, yaitu dengan melakukan

a. Penyelesaian peraturan dan ketentuan operasional dalam rangka pelaksanaan tugas BP Batam;
b. Peningkatan sumber daya manusia, khususnya dalam hal diklat teknis sesuai kebutuhan masing-masing unit kerja terkait kompetensi yang dibutuhkan;
c. Memanfaatkan/mengoptimalkan aset yang ada untuk memperoleh nilai tambah dalam mendukung pembiayaan sarana dan prasarana;
d. Perlunya terobosan baru agar capaian kinerja terhadap target yang telah ditetapkan BP Batam menjadi lebih efektif dengan menggabungkan pola "*top down*" dan "*bottom up*" dilingkungan kerja internal BP Batam sehingga capaian kinerja yang dibutuhkan dalam rangka pencapaian visi dan misi BP Batam dapat terlaksana.

Untuk masa mendatang, hasil evaluasi dan analisis diatas akan dijadikan masukan guna pencapaian sasaran sesuai dengan yang diharapkan. Beberapa prinsip penyusunan dan penyajian laporan telah disajikan dengan berbagai pertimbangan. Prinsip-prinsip penyusunan laporan yang baik mungkin saja belum semua dapat diterapkan pada Laporan Kinerja ini. Namun demikian, kami terus berupaya agar laporan ini dapat memenuhi tujuan penyusunnya.

Daftar Isi

Daftar Isi

Kata Pengantar i
Ringkasan Eksekutif iii
Daftar Isi viii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Gambaran Umum 1
B. Isu Strategis Badan Pengusahaan Batam 2
C. Kedudukan Badan Pengusahaan Batam 5
D. Tugas Pokok dan Fungsi 6
E. Struktur Organisasi 8
F. Organisasi Pembina dan Asistensi 8
G. Lingkungan yang Berpengaruh 10

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 13

A. Rencana Strategis 13
B. Perjanjian Kerja 33

BAB III AKUNTABILITAS KERJA 36

A. Pengukuran Kinerja : Capaian Indikator Kinerja Utama 36
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja 36
C. Akuntabilitas Keuangan 43

BAB IV PENUTUP 46

Daftar Grafik dan Tabel

Gambar 1.1 Struktur Organisasi BP Batam 8

Gambar 1.2 Analisis SWOT 11

Tabel 2.1 Uraian Keterkaitan Tujuan Sasaran dan indikator Kinerja BP Batam 18

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Sasaran Strategis 21

Tabel 2.3 Alur Visi - Misi - Realisasi 2016 24

Gambar 2.1 Grafik Realisasi Anggaran 2016 26

Tabel 2.4 Hubungan Kegiatan Terhadap IKU 29

Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2016 33

Tabel 3.1 Indikator Sasaran Kerja Ke-1 37

Tabel 3.2 Indikator Sasaran Kerja Ke-2 37

Tabel 3.3 Indikator Sasaran Kerja Ke-3 38

Tabel 3.4 Indikator Sasaran Kerja Ke-4 39

Tabel 3.5 Indikator Sasaran Kerja Ke-5 40

Gambar 3.1 Grafik Capaian IKU 2016 40

Tabel 3.6 Perbandingan Kinerja 2014-2015 42

Tabel 3.7 Realisasi PNBP 2016 43

Tabel 3.8 Realisasi PNBP 2016 43

Tabel 3.9 Realisasi Penyerapan Anggaran 2016 44

BAB I

Pendahuluan

BAB I
PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Pulau Batam merupakan salah satu pulau di antara 329 pulau dalam gugusan Kepulauan Riau, yang terletak antara Selat Malaka dan Singapura. Langkanya catatan tertulis dari pulau ini, maka hanya ada satu literatur yang menyebut nama Batam, yaitu Traktat London yang mengatur pembagian wilayah kekuasaan antara Belanda dan Inggris. Namun, menurut para pesiar dari China, pulau ini sudah dihuni sejak 231 M ketika Singapura masih disebut Pulau Ujung.

Sebelum mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat, Batam merupakan sebuah pulau kosong berupa hutan belantara yang nyaris tanpa denyut kehidupan. Namun, terdapat beberapa kelompok penduduk yang lebih dahulu mendiami pulau ini. Mereka berprofesi sebagai penangkap ikan dan bercocok tanam. Mereka sama sekali tidak banyak terlibat dalam mengubah bentuk fisik pulau ini yang merupakan hamparan hutan belantara.

Pada tahun 1970-an, Pulau Batam mulai dikembangkan sebagai basis logistik dan operasional untuk industri minyak dan gas bumi oleh Pertamina. Kemudian berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 41 tahun 1973, pembangunan Batam dipercayakan kepada lembaga pemerintah yang bernama Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (OPDIPB) atau disingkat dengan Otorita Batam.Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam disebutkan bahwa Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam berubah menjadi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Batam dengan keberadaannya selama 70 tahun sejak PP 46 tersebut ditandatangani atau diberlakukan.

Dalam rangka melaksanakan visi dan misi untuk mengembangkan Pulau Batam, maka dibangun berbagai insfrastruktur modern yang berstandar internasional, serta berbagai fasilitas lainnya, sehingga diharapkan mampu bersaing dengan kawasan serupa di Asia Pasifik.

Berbagai kemajuan telah banyak dicapai selama ini, seperti tersedianya berbagai lapangan usaha, khususnya penanaman modal asing dari berbagai negara, yang mampu menampung tenaga kerja yang berasal hampir dari seluruh daerah di tanah air. Begitu juga dengan jumlah penerimaan daerah maupun pusat dari waktu ke waktu terus meningkat. Hal ini tidak lain karena semakin tumbuhnya kegiatan industri, perdagangan, alih kapal, dan pariwisata. Namun, sebagai daerah yang berkembang pesat, Batam juga tidak luput dari

masalah. Untuk itulah, dilakukan penyempurnaan pengembangan Pulau Batam agar dapat melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada.

B. Isu Strategis Badan Pengusahaan Batam

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah atau masyarakat di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraanmasyarakat dalam jangka panjang. Dengan demikian, kebijakan institusi tidak lagi bersifat reaktif, tetapi lebih antisipatif. Tanpa itu, akan banyak peluang-peluang penting akan hilang, dengan ancaman tidak dikenali atauterlambat diantisipasi.

Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifatpenting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembangaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Faktor penting lain yang perlu diperhatikan dalam merumuskan isu strategis adalah telaahan terhadap visi, misi dan program organisasi agar rumusan isu yangdihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kinerja organisasi, serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah.

Isu strategis juga merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan. Jika dinamika eksternal, khususnya selama 5 (lima) tahun yang akan datang, diidentifikasi dengan baik, maka Badan Pengusahaan Batam akan dapat mempertahankan/meningkatkan pelayanan pada masyarakat.

Untuk mendukung instrumen kebijakan dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang berdaya saing untuk meningkatkan nilai investasi adalah pengaturan dalam pelayanan, khususnya yang di bawah naungan pengelolaan BP Batam.

Beberapa aspirasi dari masyarakat (*stakeholders*) yang dianggap mampu menjadi daya ungkit Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, yaitu

1. Pelayanan yang berhubungan dengan berbagai macam perijinan yang terdapat di Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kota Batam dan jajaran instansi, baik vertikal maupun horizontal, agar pelaksanaannya dapat diterapkan di satu tempat saja, sehingga dapat lebih cepat dan memudahkan masyarakat (*stakeholder*) dalam hal pengurusan perijinan;

2. BP Batam sebagai pengelola Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam diharapkan segera meningkatan kapasitas kepelabuhanannya, khususnya dalam hal bongkar muat barang, karena kapasitas yang ada saat ini dirasa kurang efektif dan waktu tunggu keluar masuk barang menjadi kurang efisien;
3. Kebijakan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang mendukung iklim investasi dan daya dukung kehidupan masyarakat;
4. Profesionalisme pengelola Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (*stake holder*) yang berlandaskan atas prinsip efektif, efisien dan transparant.

Sedangkan beberapa isu strategis Badan Pengusahaan Batam yang perlu diatasi dalam pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, antara lain

1) Peraturan perundangan. UU 44 Tahun 2007 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang belum dilengkapi dengan peraturan teknis yang mengatur secara lebih rinci ketentuan-ketentuan dalam UU tersebut.

   Hal-hal yang perlu dirumuskan dalam peraturan teknis antara lain adalah masalah pelimpahan perizinan, pembiayaan pembangunan, pembagian pendapatan, pertanahan, dll. Salah satu pelayanan yang diinginkan oleh calon investor dari pengelola kawasan adalah kemudahan dalam memperoleh berbagai izin yang disyaratkan oleh pemerintah pusat maupun daerah, yang umumnya dalam bentuk pelayanan satu atap (*one stop service*). Lama pengurusan dan biaya, serta prosedur permintaan izin-izin harus ditetapkan dalam peraturan tersebut.

   Pengembangan dan pengoperasian Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam juga akan menyangkut kepentingan dan urusan tingkat daerah, seperti masalah tata ruang, penyediaan dan pengoperasian prasarana dan sarana, dll. Untuk itu perlu dibuat beberapa peraturan daerah, karena melibatkan daerah otonom.

2) Pengembangan infrastruktur. Untuk menunjang kegiatan investasi di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, maka infrastruktur harus dipelihara, dikembangkan dan ditingkatkan. Peningkatan infrastruktur juga melingkupipengembangan sistem dan prosedur yang memberi kemudahan bagi investor menjalankan usahanya, seperti sistem kepabeanan, sistem keimigrasian,

sistem kepelabuhanan, sistem penerbangan, sistem perbankan, dll. Pembangunan infrastruktur dapat dibiayai oleh swasta, pemerintah daerah atau pemerintah pusat.

3) Insentif. Insentif yang menarik diperlukan untuk mendatangkan investor. Adanya investasi asing diharapkan akan membuka lapangan kerja, meningkatkan penguasaan teknologi dan manajemen usaha, mendorong tumbuhnya industri pendukung, dan mendatangkan devisa dari kegiatan ekspor yang dilakukan.

4) Tata kelola. Untuk dapat bersaing dengan FTZ lain maka pengelolaan perlu dilakukan secara profesional dengan praktek manajemen standar internasional. Dalam kaitan ini, Badan Pengusahaan Batam dapat membangun suatu pola kerjasama yang sifatnya mutualistik dengan kawasan sejenis di ASEAN. Selain itu, perlu secara seksama memanfaatkan kerjasama ekonomi sub-regional yang telah dikembangkan selama ini, khususnya dalam konteks IMS-GT dan IMT-GT, dengan membuka kerjasama dan hubungan bisnis yang intensif dengan kawasan sejenis di berbagai negara.

5) Ketenagakerjaan. Investor yang beroperasi di Batam akan memerlukan tenaga terampil dalam jumlah banyak. Apalagi seiring dengan dimulainya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di awal 2016, yang memungkinkan tenaga kerja asing mengisi posisi pada bidang-bidang tertentu, maka hal ini perlu diantisipasi. Pada saat ini tenaga terampil tersebut masih belum mencukupi. Untuk itu agar kekurangan tenaga terampil itu tidak diisi oleh pendatang dari luar Batam atau luar negeri, maka sejak dini generasi muda di Kawasan Batam perlu disiapkan untuk menjadi tenaga-tenaga terampil yang siap dipekerjakan. Pengusaha lokal juga perlu disiapkan untuk dapat menjadi penyalur bahan pangan dan industri bagi perusahaan industri pengolahan dari luar yang akan menjalankan usahanya di Kawasan Batam.

6) Kelembagaan. Perlu dilakukan pengaturan yang harmonis antara Pemerintah Pusat, BP Batam dengan Pemko Batam agar pembangunan Kawasan Batam tidak mengalami berbagai kendala. Beberapa kendala yang sering dihadapi antara lain masalah pertanahan, perizinan, pengelolaan, pembiayaan, tata ruang dan lingkungan, dll. Pola hubungan kerjasama antara Pemko Batam dengan BP Batam juga perlu dikaji secara mendalam, sehingga dapat terjadi suatu pola kemitraan yang sinergis antar kedua lembaga. Kejelasan terhadap kewenangan, khususnya antara kewenangan Pusat yang diemban oleh BP Batam dan kewenangan Pemko Batam, perlu ditetapkan untuk menghindari adanya tumpang tindih dan konflik yang mungkin terjadi dalam pengelolaan dan pengusahaan kawasan Batam di masa mendatang.

C. Kedudukan Badan Pengusahaan Batam

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2007, kawasan Batam ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas untuk jangka waktu 70 tahun.

Wilayah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (KPBPB) meliputi Pulau Batam, Pulau Tonton, Pulau Setokok, Pulau Nipah, Pulau Rempang, Pulau Galang dan Pulau Galang Baru. Wilayah kerja KPBPB ditambah dengan Pulau Janda Berhias dan gugusannya dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor5 Tahun 2011tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Belabuhan Bebas Batam.

Kegiatan utama pengembangan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam ditujukan dalam bidang ekonomi yang meliputi sektor perdagangan, maritim, industri, perhubungan, perbankan dan pariwisata. Hak pengelolaan atas tanah yang menjadi kewenangan Otorita Batam dan Pemerintah Kota Batam di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam beralih kepada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam).

Penetapan Batam sebagai salah satu Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagaimana yang telah ditetapkan didalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 tahun 2007 dan Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2007, maka kelembagaan yang dahulunya adalah Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam berubah menjadi ***Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam*** atau disingkatdengan ***Badan Pengusahaan Batam (BP Batam).***

Dalam rangka mendukung pengembangan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas yang dijalankan oleh BP Batam, pemerintah mengeluarkan beberapa ketentuan/peraturan sebagai berikut

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tanggal 20 Agustus 2007;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 tanggal 4 Pebruari 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
4. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tanggal 29 Februari 2016Tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
5. Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan BebasDan Pelabuhan Bebas Batam;
6. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Pemberhentian Dan Penetapan Dan Pengangkatan Kepala, Wakil Kepala, Dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam.

C. Tugas Pokokdan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebasdan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam, Badan Pengusahaan Batam mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sesuai dengan fungsi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Badan Pengusahaan Batam dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas di bidang Umum dan Sekretariat, Keuangan, Sumber Daya Manusia, Hukum dan Organisasi, Pusat Pengelolaan Data dan Sistem Informasi serta Perwakilan;
b. perumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas di bidang Perencanaan Program dan Penelitian dan Pengembangan, Perencanaan Teknik, Pengembangan Usaha, Pelayanan dan Pentarifan, dan Pengembangan Manajemen Kinerja;
c. perumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas di bidang Pengusahaan Sarana Bandar Udara, Pelabuhan Laut, Rumah Sakit, dan Pengelolaan Lahan;

d. perumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas di bidang Pembangunan Prasarana dan Sarana, Pemanfaatan Aset, serta Pengelolaan Air dan Limbah; dan

e. perumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas di bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Lalu Lintas Barang, Promosi dan Hubungan Masyarakat, serta Pengamanan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala Dewan Kawasan tersebut, Badan Pengusahaan Batam mempunyai kewenangan:

a. membuat ketentuan-ketentuan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;

b. mengeluarkan izin-izin usaha dan izin lainnya yang diperlukan bagi para pengusaha yang mendirikan dan menjalankan usaha di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

c. membuat peraturan di bidang tata tertib pelayanan dan penerbangan, lalu lintas barang di pelabuhan dan penyediaan fasilitas pelabuhan dan lain sebagainya serta penetapan tarif segala macam jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

d. melaksanakan tugas dan wewenang lain, yang meliputi:

   1) pengelolaan, pembangunan, sesuai dengan fungsi-fungsi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, serta melaksanakan percepatan pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sehingga mampu bersaing dengan Kawasan sejenis di negara lain.

   2) kegiatan-kegiatan di bidang ekonomi, seperti sektor industri, maritim, perdagangan, perhubungan, perbankan, pariwisata, dan bidang lainnya;

   3) memproses Perizinan Usaha yang telah dilimpahkan kewenangannya kepada Badan Pengusahaan Batam dan melaksanakan Pelayanan Perizinan Terpadu bekerjasama dengan Pemerintah Kota Batam.

e. tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d tidak termasuk tugas-tugas dan wewenang Pemerintah Kota Batam, kecuali terhadap tugas dan wewenang yang dilimpahkan kepada Badan Pengusahaan Batam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

D. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut di atas, Dewan Kawasan menetapkan organisasi Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) yang mempunyai susunan organisasi dan tata kerja, berdasarkanPeraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan BebasDan Pelabuhan Bebas Batam, sebagai berikut

Gambar 1.1 Struktur Organisasi BP Batam

Dalam melaksanakan tugas, Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengusahaan Batam dibantu oleh 5 anggota atau deputi yang mempunyai tugas sesuai bidangnya, yaitu

1. Anggota 1/Deputi Bidang Administrasi dan Umum;
2. Anggota 2/Deputi Bidang Perencanaan dan Pengembangan;
3. Anggota 3/Deputi Bidang Pengusahaan Sarana Usaha;
4. Anggota 4/Deputi Bidang Pengusahaan Sarana Lainnya;
5. Anggota 5/Deputi Bidang Pelayanan Umum.

Sedangkan sebagai penjabaran dari peraturan dewan kawasan dimaksud Kepala Badan Pengusahaan Batam mengeluarkan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Batam Tahun 2011 Tentang Kelengkapan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Batam.

E. Organisasi Pembinadan Asistensi

Dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam tanggal 29 Februari 2016, penetapan

kebijakan umum, pembinaan, pengawasan dan pengkoordinasian kegiatanBadan Pengusahaan Batam dilakukan oleh Dewan Kawasan yang keanggotaannya terdiri dari

Ketua merangkap anggota : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Anggota :
1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BadanPertanahan Nasional;
6. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
7. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Sekretaris Kabinet;
9. Gubernur Kepulauan Riau;
10. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
11. Walikota Batam.

Pertumbuhan Daerah Industri Pulau Batam tidak lepas dari peran Dewan Kawasan yang memberikan bimbingan dan arahan yang diberikan kepada BP Batam.

Dewan Kawasan mempunyai tugas sebagai berikut

a. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan Kawasan Bebas Batam yang dilakukan oleh Badan Pengusahaan Batam;
b. mengkoordinasikan kebijakan-kebijakan Pemerintah Pusat yang berhubungan dengan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan Kawasan Bebas Batam;
c. Memberikan bimbingan dan arahan kepada Badan Pengusahaan Batam mengenai pengelolaan, pengembangan dan pembangunan Kawasan Bebas Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sesuai dengan kebijaksanaan umum Pemerintah Pusat di bidang pembangunan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Kawasan (DK) dapat membentuk Sekretariat Dewan Kawasan dan Tim Teknis. DK melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Presiden dan DK bertugas selama 5 tahun terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Presiden (Keppres) tersebut.

F. Lingkungan Strategisyang Bepengaruh

Analisis SWOT (*Strenghts, Weakness, Opportunities and Threats*)

Internal	**Kekuatan (Strengths)** 1. Lokasi geografis yang strategis; 2. Ketersediaan tenaga kerja; 3. Badan Pengusahaan Batam diberikan hak pengelolaan lahan di Batam, Rempang, Galang dan pulau-pulau sekitarnya untuk pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pembangunan; 4. Pelayanan kepada publik dan dunia usaha secara prima, antara lain berupa penyediaan lahan, dan penerbitan izin usaha PMA yang dilaksanakan dengan sistem pelayanan satu atap; 5. Perkembangan organisasi Badan Pengusahaan Batam dalam mengelolapembanganan yang dilakukan selama ini, telah memberikan manfaatdalam penyederhanaan pelayanan perijinan dan investasi. 6. Hubungan ekonomi regional yang saling mengisi; 7. Terjalinnya hubungan yang kuat dengan Singapura.	**Kelemahan (Weakness)** 1. Keterbatasan tenaga kerja yang andal; 2. Kebijakan perizinan yang belum mendukung; 3. Masih rendahnya penegakkan hukum terutama dalam mengatasi permasalahan pertanahan terutama dalam penyerobotan lahan yang dijadikan pemukiman liar; 4. Belum adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur hubungan kerja antara Badan Pengusahaan Batam dengan Pemerintah Kota Batam; 5. Belum terpadu dan terintegrasinya kegiatan promosiinvestasi antara Badan Pengusahaan Batam dan Pemerintah Kota Batam; 6. Masih kurangnya kebijakan dan sarana pelatihan ketenagakerjaan untuk mendukung peningkatan ketenagakerjaan; 7. Terbatasnya sumber daya alam (air) dan terbatasnya ketersediaan lahan untuk pengembangan di masa yang akan datang; 8. Pengaruh ego sektoral antarlingkungan intansi terkait di Batam pada skala lokal dan regional;
Eksternal	**Peluang (Opportunities)** 1. Letak Pulau Batam sangat strategis di salah satu jalur pelayaran internasional paling ramai dan dapat diakses dengan mudah; 2. Keuntungan berinvestasi di Batam terletak pada biaya investasi, harga sewa lahan, tenaga kerja, peralatan dan biaya operasional yang kompetitif; 3. Tersedianyasaranaperhubungan darat, laut dan udara dengan standar internasional untuk memenuhi kebutuhan investasi termasuk tersedianya sarana air bersih dan listrik; 4. Komitmen Pemerintah Pusat yang kuat untuk mendukung pengembangan investasi di Indonesia; 5. Indonesia telah menjadi lokasi investasi	**Ancaman (Threats)** 1. Adanya pengembangan kawasan baru yang sejenis dibeberapa negara Asia, seperti Malaysia, Vietnam, Philipina, Cina dan India; 2. Berkembangnya dinamika ekonomi Singapura; 3. Pemberlakuan MEA (Masyarakat Ekonomi Asian) dimana seluruh kegiatan perdagangan barang dan jasa dilakukan secara bebas oleh seluruh anggota negara ASEAN; 4. Halangan perdagangan yang menahan perkembangan ekonomi.

	yang menarik; 6. Pertumbuhan ASEAN sebagai blok ekonomi yang penting; 7. Potensi Indonesia sebagai pusat pelayaran yang penting; 8. Relokasi perusahaan multinasional di beberapa negara akibat globalisasi; 9. Munculnya sektor ekonomi baru seperi industri hijau dan teknologi informasi dan komunikasi	

Gambar 1.2. Analisis SWOT

BAB II

Perencanaan dan Perjanjian Kerja

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Memperhatikan hasil evaluasi Laporan KinerjaBadan Pengusahaan Batamperiode sebelumnya, dan dimulainya acuan baru kepada Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengusahaan(BP) Batam Tahun 2015—2019, maka telah ditetapkan 12 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan sasaran strategis BP Batam hingga 5 tahun ke depan.

Dua belas IKU tersebut adalah sebagai berikut

1. persentase jaminan kepastian hukum dalam berinvestasi di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
2. tersusunnya *granddesign* (*roadmap*) reformasi birokrasi di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
3. persentase peningkatan akuntabilitas kinerja di Badan Pengusahaan Batam;
4. nilai investasi real di 8 fokus industri yang dikembangkan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tercapai sebanyak 2,9 milyar dolar Amerika Serikat di tahun 2019;
5. waktu pelayanan perizinan investasi 15 hari;
6. target pendapatan Pelabuhan Laut Batam tercapai1,6 trilyun rupiah di tahun 2019;
7. waktu pelayanan bongkar muat barang dan kontainer Pelabuhan Laut Batam maksimum 7 hari;
8. target pendapatan Bandara Hang Nadim Batam tercapai1,1 trilyun rupiah di tahun 2019;
9. waktu pelayanan bongkar muat barang kontainer dan kargo Bandara Hang Nadim maksimum 45 menit;
10. target pendapatan Rumah Sakit Otorita Batam – Badan Pengusahaan Batam tercapai 887 milyar rupiah di tahun 2019;
11. target pendapatan Kantor Air tercapai 365 milyar rupiah di tahun 2019; dan
12. terjaganya kualitas udara dan air yang baik.

Penetapan IKU tersebut telah memenuhi kriteria minimum sebagai indikator kinerja yang baik, antara lain

1. keterukuran (*measurability*) dan keterkaitan (*relevance*) terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan;

2. spesifik dan jelas terhadap hasil atau capaian kinerja (tujuan/sasaran/*outcomes*);
3. indikator yang ditetapkan dapat dicapai (*achievable*) oleh organisasi;
4. menggambarkan suatu kinerja yang dicapai dalam kurun waktu tertentu (*timebound*).

Pelaksanaan Tahun Anggaran 2016 ini merupakan tahun kedua dari Perencanaan StrategisBadan Pengusahaan Batam 2015—2019. Renstra yang disusun bersama-sama dengan melibatkan seluruh komponen organisasi, merupakan dasar dari perencanaan dan harus diimplementasikan dalam rangka mencapai Visi dan Misi Badan Pengusahaan Batam. Penyusunan Renstra pun telah mengikuti pola, berupa tahapan kegiatan mulai dari yang paling ideal/kualitatif sampai dengan yang paling teknis dan kuantitatif.

A.1. Visi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh organisasi pemerintah, dalam hal ini BP Batam.

Dengan mempertimbangkan kemajuan yang telah dicapai pada periode 2010—2014, serta memperhatikan hasil analisis isu strategis dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015—2019, tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka visi pembangunan BPBatam tahun 2015—2019seperti yang tertulis di dalam Renstra BP Batam 2015-2019 adalah

"Menjadikan Batam sebagai Kawasan Investasi yang Berdaya Saing di Asia Tenggara"

Berdasarkan visi diatas maka beberapa elemen utama yang tergabung dalam visi BP Batam, antara lain

a. sebagai pengelola kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, dalam hal ini BPBatam memiliki komitmen untuk merealisasikan Pulau Batam dalam lingkup pengelolaannya sebagai kawasan yang mampu bersaing dengan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas lainnya, khususnya di kawasan Asia Tenggara;
b. elemen kawasan investasi yang berdaya saing mengandung makna suatu kawasan yang menarik bagi kegiatan investasi yang didukung dan difasilitasi oleh

1) lokasi yang strategis;

2) kemudahan perizinan, baik barang maupun jasa;

3) sarana prasarana yang berstandar internasional;

4) birokrasi yang mudah;

5) pemberian insentif yang tunduk mengikuti aturan yang dikeluarkan organisasi perdagangan internasional (WTO);

6) mendorong pembentukan usaha kepemilikan pribadi, dan

7) peningkatan produktivitas tenagakerja.

c. Asia Tenggara, merupakan batasan kawasan regional yang ingin dituju sebagai kawasan yang mempunyai kemampuan bersaing dalam mewujudkan tempat usaha yang menguntungkan dalam kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas di antara kawasan sejenis di Asia Tenggara.

Dalam rangka menjadi pengelola kawasan yang mampu bersaing, diharapkan mampu pula menarik minat industrialis asing, *trader* dan *bankir* asing, serta pengelola usaha lainnya untuk menempatkan kegiatan usahanya di Batam, yang ditandai tidak hanya dengan kenaikan pertumbuhan nilai realisasi investasi, namun berkembang pula menjadi pusat industri inti yang maju dengan pusat-pusat industri yangterkonsentrasi.

A.2. Misi

Untuk mewujudkan dan merealisasikan visi tersebut maka ditetapkan misi BP Batam, sebagai berikut

1. **Memantapkan pengelolaan kawasan investasi yang profesional;**
2. **Mewujudkan kawasan investasi yang memiliki infrastruktur yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK);**
3. **Mewujudkan kawasan investasi yang berwawasan lingkungan.**

Penjelasan Misi:

1. *Memantapkan pengelolaan kawasan investasi yang profesional;* misi ini merupakan langkah utama BP Batam sebagai pengelola kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas dalam upaya meningkatkan pengaturan pengelolaan tugas pokok dan fungsinya melalui cara peningkatan pembangunan sumberdaya manusia yang produktif, kompetitif, profesional yang mengedepankan partisipasi, transparasi, responsibilitas dan berorientasi pada konsesi bersama secara adil, efektif, efisien, akuntabel, serta tunduk dan taat dalam penegakkan supermasi hukum sebagai

sarana untuk menciptakan tata kelola pengelolaan yang baik dan mendukung reformasi birokrasi.

2. *Mewujudkan kawasan investasi yang memiliki infrastruktur yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK)*; misi ini merupakan upaya pencapaian tujuan pembangunan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang akan dicapai melalui perwujudan kawasaninvestasi yang berlandaskan pada etika bisnis dan berkelanjutan yang didukung oleh sarana dan prasarana, baik fisik maupun nonfisik berstandar internasional, serta keunggulan teknologi informatika dan komunikasi yang handal dengan fokus utama pada peningkatan nilai investasi.
3. *Mewujudkan kawasan investasi yang berwawasan lingkungan*, misi ini merupakan upaya dalam memfasilitasi kawasan-kawasan investasi yang dikembangkan dengan berwawasan lingkungan, khususnya dalam konteks penyediaan sarana dan prasarana dasar dengan kapasitas yang memadai, serta kualitas yang berstandar internasional dalam menjaga pengelolaan lingkungan hidup yang mantap guna mendukung kegiatan pengembangan dan pengelolaan investasi. Pengembangan kawasan Batam dilakukan dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi tersebut Badan Pengusahaan Batam, dalam Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 161 Tahun 2015, menetapkan nilai-nilai Budaya Kerja, yang disingkat dengan SPIRIT, sebagai berikut

1. Service Excellence.

   Dalam *Service Excellence* terkandung makna bahwa dalam memberikan pelayanan, Pimpinan dan seluruh pegawai di lingkungan Badan Pengusahaan Batam melakukannya untuk memenuhi kepuasan pemangku kepentingan dan dilaksanakan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat, dan aman.
2. Professional.

   Dalam *Professional* terkandung makna bahwa dalam bekerja, pimpinan dan seluruh karyawan di lingkungan Badan Pengusahaan Batam melakukannya dengan tuntas dan akurat berdasarkan kompetensi terbaik dan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.
3. Innovative.

   Dalam *Innovative* terkandung makna bahwa dalam bekerja, pimpinan dan seluruh karyawan di lingkungan Badan Pengusahaan Batam menggunakan dengan optimal

semua sumber daya yang ada dengan kreatifitas tinggi untuk menghasilkan perbaikan dan perubahan positif yang berkelanjutan ke arah kemajuan.

4. Integrity.

   Dalam *Integrity* terkandung makna bahwa dalam berpikir, berkata dan berperilaku dan bertindak, pimpinan dan seluruh karyawan di lingkungan Badan Pengusahaan Batam melakukannya dengan baik dan benar, konsisten serta selalu memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.

5. Entrepreneurship.

   Dalam *Entrepreneurship* terkandung makna bahwa pimpinan dan seluruh karyawan di lingkungan Badan Pengusahaan Batam memiliki jiwa dan perilaku menciptakan peluang usaha dengan mempertimbangkan risiko.

A.3. Tujuan

Berdasarkan pada faktor kunci keberhasilan (*Critical Succes Factor*), selanjutnya untuk mencapai Visi dan Misi Badan PengusahaanBatam ditetapkan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan strategi yang tepat untuk digunakan dalam pencapaian dimaksud.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Pengusahaan Batam adalah sebagai berikut

1. meningkatkan peran kelembagaan yang profesional dalam mengantisipasi persaingan ekonomi dan perdagangan global;
2. menjaring dan mengembangkan kawasan investasi dalam sektor industri, perdagangan dan pariwisata yang berbasis teknologi informatika dan komunikasi;
3. mengembangkan sarana prasarana kepelabuhanan yang berstandar internasional;
4. mengembangkan pengelolaan lingkungan hidup di kawasan investasi yang berwawasan lingkungan.

Melalui tujuan di atas maka diharapkan akan menarik dan mengembangkan investasi dalam sektor industri, perdagangan, alih kapal *(transhipment)* dan pariwisata, juga dapat lebih mengembangkan, serta membangun sarana dan prasarana serta infrastruktur yang memadai dalam mendukung pengembangan pembangunan kawasan investasi yang berwawasan lingkungan.

A.4. Sasaran

Upaya yang dilakukan dalam mencapai tujuan lima tahun ke depan maka sasaran strategis Badan PengusahaanBatam telah ditetapkan dalam tiap tahun anggaran dan merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan.Hal itu juga menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun dan

dialokasikan dalam lima periode secara tahunan melalui rangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja (*Performance Plan*). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun untuk kurun waktu limatahun.

Badan PengusahaanBatam dalam menetapkan sasaran adalah bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Badan Pengusahan Batam, serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh dan melibatkan keseluruhan satuan kerja di lingkungan Badan Pengusahaan Batam. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis. Apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah tercapai, maka diharapkan bahwa tujuan strategis juga telah dapat dicapai.

Selanjutnya, pada masing-masing sasaran ditetapkan program yang akan dijalankan untuk mencapai sasaran terkait. Sama halnya seperti sasaran terhadap tujuan, program-program yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian sasaran yang terkait.

Secara keseluruhan, sasaran Badan Pengusahan Batam tahun 2016 dapat dijabarkan sebagai berikut

1. terwujudnya aturan dan regulasi yang berpihak pada pengembangan investasi;
2. terwujudnya profesionalitas dalam manajemen pengelolaan yang menerapkan prinsip *good governance* dan *good corporate governance* dan penerapan *open government*;
3. tercapainya target realisasi nilai investasi dari 8 fokus industri;
4. tersedianyasaranaprasarana kepelabuhanan yang menghubungkan simpul jasa kawasan investasi yang berstandar internasional;
5. terciptanya kawasan investasi yang sehat dan berwawasan lingkungan.

Berikut adalah tabel keterkaitan antara tujuan, sasaran dan indikator kinerja

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
1. Meningkatkan peran kelembagaan yang profesional dalam mengantisifasi persaingan ekonomi dan perdagangan global	1.1. Terwujudnya aturan dan regulasi yang berpihak pada pengembangan investasi; 1.2. Terwujudnya profesionalitas dalam manajemen pengelolaan yang menerapkan prinsip *goodgovernance* dan *goodcorporategovernance*	1.1.1. Persentase jaminan kepastian hukum dalam berinvestasi di KPBPB Batam 1.1.2. Tersusunnya *granddesign* (*roadmap*) dan reformasi birokrasi di KPBPB Batam 1.1.3. Persentase peningkatan akuntabilitas kinerja di BP Batam
2. Menjaring dan mengembangkan kawasan investasi dalam sektor industri, perdagangan dan	2.1. Tercapainya target realisasi nilai investasi dari 8 fokus industri	2.1.1. Nilai investasi real di 8 fokus industri yang dikembangkan KPBPB Batam tercapai sejumlah 2,9 milyar dolar AS di tahun 2019;

pariwisata yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi		2.1.2. Waktu pelayanan perizinan investasi 13 hari
3. Mengembangkan sarana prasarana kepelabuhanan yang berstandar internasional	3.1. Tersedianya sarana prasarana kepelabuhanan yang menghubungkan simpul jasa kawasan investasi yang berstandar internasional	3.1.1. Target pendapatan pelabuhan laut tercapai Rp1,6 trilyun di tahun 2019; 3.1.2. Waktu pelayanan bongkar muat barang kontainer dan kargo pelabuhan laut maksimum 7 hari; 3.1.3. Target pendapatan bandara tercapai Rp1,1 trilyun di tahun 2019; 3.1.4. Waktu pelayanan bongkar muat barang kontainer dan kargo bandara Hang Nadim maksimum 45 menit
4. Mengembangkan pengelolaan lingkungan hidup	4.1. Terciptanya kawasan investasi yang sehat dan berwawasan lingkungan	4.1.1. Target pendapatan rumah sakit tercapai Rp887 milyar di tahun 2019; 4.1.2. Target pendapatan kantor air tercapai Rp356 milyar di tahun 2019; 4.1.3. Terjaganya kualitas udara dan air yang baik

Tabel 2.1. Uraian Keterkaitan Tujuan Sasaran dan Indikator Kinerja BP Batam

Adapun target sasaran BP Batam tiap tahun sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini

No.	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Keterangan/Formulasi Perhitungan
1	Presentase jaminan kepastian hukum dalam berinvestasi di KPBPB Batam	33	37	40	44	49	Jumlah regulasi yang telah dilimpahkan Pemerintah Pusat ke BP Batam
2	Tersusunnya *grauddenge* dan reformasi birokrasi di KPBPB Batam.	100%	100%	100%	100%	100%	tersedianya pedoman pelaksanaan Road Map RB
3	Persentasepeningkatan akuntabilitas kinerja di BP Batam.	100%	100%	100%	100%	100%	Jumlah Unit yang melaksanakan Laporan Akuntabilitas Kinerja
4	Nilai investasi real di 8 fokus industri yangdikembangkan KPBPB Batam tercapai sejumlah 2,9 Milyar USD di tahun 2019	USD 339.417.526	USD 400.000.000	USD 558.001.149	USD 695.259.452	USD 866.305.712	Nilai Investasi per tahun
5	Waktu pelayanan perijinan investasi 15 hari	4 hari	4 hari	2 hari	2 hari	2 hari	Waktu Layanan Minimum
6	Target pendapatan pelabuhan laut tercapai Rp1,6 Trilyun di tahun 2019	Rp210.855.000.000	Rp214.050.000.000	Rp235.337.217.000	Rp258.088.239.000	Rp282.872.363.000	Pendapatan per tahun
7	Waktu pelayanan bongkar muat barang dan kontainer pelabuhan laut max 7 hari	4 hari	4 hari	4 hari	4 hari	4 hari	Waktu Layanan Minimum
8	Target pendapatan bandara tercapai Rp1,1 Trilyun di tahun 2019	Rp115.855.000.000	Rp125.584.000.000	Rp235.337.217.000	Rp258.088.239.000	Rp282.872.363.000	Pendapatan per tahun
9	Waktu pelayanan bongkar muat barangkontainer dan kargo Bandara Hang Nadim max 45 menit	45 menit	30 menit	30 menit	30 menit	30 menit	Waktu Layanan Minimum

10	Target pendapatan Rumah Sakit tercapai Rp897 Milyar di tahun 2019	Rp90.245.000.000	Rp95.717.000.000	Rp96.917.000.000	Rp100.602.000.000	Rp110.559.000.000	Pendapatan per tahun
11	Target pendapatan Kantor Air tercapai Rp365 Milyar di tahun 2019	Rp26.541.000.000	Rp27.744.000.000	Rp28.409.579.000	Rp28.894.847.000	Rp30.394.880.000	Pendapatan per tahun
12	Terjaganya kualitas udara dan air yang baik	100	100	100	100	100	Tersedianya kualitas udara dan air yang memenuhi kepuasan masyarakat

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Sasaran Srategis

A.5. Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran perlu dipilih strategi yang tepat sehingga dapat mewujudkan visi dan misi. Arah kebijakan strategis BP Batam, merupakan pedoman dalam penyusunan sasaran strategi dan program kerja yang direncanakan dan disusun sebagai pendekatan dalam memecahkan permasalahan yang akan datang dan diharapkan memiliki dampak yang positif terhadap pencapaian sasaran nasional dan sasaran strategis BP Batam dengan mempertimbangkan potensi sumber daya BP Batam dalam melaksanakan program dan kegiatan.

Bersamaan dengan hal tersebut, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan BP Batam telah dirumuskan dalam rangka mencapai tujuan dalam upaya mencapai visi misi BP Batam, serta mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Ketiga (2015—2019) yang dirumuskan dalam NAWACITA yang memiliki agenda, yaitu (1) menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warna Negara; (2) membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya; (3) membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan; (4) memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi bermartabat dan terpercaya; (5) meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia; (6) meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya; (7) mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; (8) melakukan revolusi karakter bangsa; dan (9) memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesiadan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) (2005—2025).

Strategi yang akan dilaksanakan BP Batam mencakup eksternal dan internal, yaitu

Eksternal:

1. Meningkatkan kualitas koordinasi kebijakan kepelabuhanan, industri dan jasa dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
2. Meningkatkan kualitas kajian dan evaluasi kebijakan dalam peningkatan pengembangan pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
3. Meningkatkan kualitas pemantauan terhadap rencana pengembangan dan promosi pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Internal:

1. Melakukan penerapan prinsip-prinsip *goodgovernance* dilingkungan kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam antara lain telah dilaksanakannya pemantapan implementasi SAKIP di BP Batam itu sendiri;
2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dan pengelolaannya dalam rangka mendukung peningkatan kinerja;
3. Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM), manajerial dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan akuntabel.

Berikut di bawah ini ditampilkan alur visi yang dijabarkan ke dalam indikator kinerja BP Batam, yaitu

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	NAMA UNIT PELAKSANA	IKU		No. IKU
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPBatam	$59.921.470.000	$16.990.960.619,55	95,01				
Penyusunan Perencanaan Program dan Penelitian Pengembangan (5113)	11.617225.000	7.355.431.488	63,14	Biro Perencanaan Program dan Penelitian dan Pengembangan	Tersusunnya *road map* reformasi birokrasi di KPBPB Batam.	Persentase peningkatan akuntabilitas kinerja di BP Batam.	2, 3
Pelayanan Kerumahtanggaan, Kesekretariatan dan Pengadaan Barang/ Jasa (5114)	72.448..020.000	63.425.153.495	87,54	Biro Umum dan Sekretariat		Persentase peningkatan akuntabilitas kinerja di BP Batam.	3
Pengelolaan dan Pelayanan Kepegawaian (5115)	735.957.699.000	718. 445 .889.217,30	97,62	Biro Sumber Daya Manusia	Tersusunnya *road map* reformasi birokrasi di KPBPB Batam	Persentase peningkatan akuntabilitas kinerja di BP Batam.	2,3
Pengelolaan Administrasi Keuangan (5116)	4.166.020.000	4.101.105.332,23	98,44	Biro Keuangan	Tersusunnya *road map* reformasi birokrasi di KPBPB Batam	Persentase peningkatan akuntabilitas kinerja di BP Batam.	2,3
Penyusunan Regulasi dan Pelayanan Hukum (5117)	9.209.800.000	3.721.731.900	40,41	Biro Hukum dan Organisasi	Presentase jaminan kepastian hukum dalam berinvestasi di KPBPB Batam		1

No.	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Keterangan/Formulasi Perhitungan
1	Presentase jaminan kepastian hukum dalam berinvestasi di KPBPB Batam	33	37	40	44	49	Jumlah regulasi yang telah dilimpahkan Pemerintah Pusat ke BP Batam
2	Tersusunnya *granddesign* dan reformasi birokrasi di KPBPB Batam.	100%	100%	100%	100%	100%	tersedianya pedoman pelaksanaan Road Map RB
3	Persentasepeningkatan akuntabilitas kinerja di BP Batam.	100%	100%	100%	100%	100%	Jumlah Unit yang melaksanakan Laporan Akuntabilitas Kinerja
4	Nilai investasi real di 8 fokus industri yangdikembangkan KPBPB Batam tercapai sejumlah 2,9 Milyar USD di tahun 2019	USD 539.417.526	USD 400.000.000	USD 558.001.149	USD 695.259.432	USD 866.305.712	Nilai investasi per tahun
5	Waktu pelayanan perijinan investasi 15 hari	4 hari	4 hari	2 hari	2 hari	2 hari	Waktu Layanan Minimum
6	Target pendapatan pelabuhan laut tercapai Rp1,6 Trilyun di tahun 2019	Rp210.855.000.000	Rp214.050.000.000	Rp235.337.217.000	Rp258.088.259.000	Rp282.872.363.000	Pendapatan per tahun
7	Waktu pelayanan bongkar muat barang dan kontainer pelabuhan laut max 7 hari	4 hari	4 hari	4 hari	4 hari	4 hari	Waktu Layanan Minimum
8	Target pendapatan bandara tercapai Rp1,1 Trilyun di tahun 2019	Rp115.855.000.000	Rp125.584.000.000	Rp235.337.217.000	Rp258.088.259.000	Rp282.872.363.000	Pendapatan per tahun
9	Waktu pelayanan bongkar muat barangkontainer dan kargo Bandara Hang Nadim max 45 menit	45 menit	30 menit	30 menit	30 menit	30 menit	Waktu Layanan Minimum

				investasi yang berstandar internasional	2019			
					3.1.2 Waktu pelayanan bongkar muat barang dan kontainer pelabuhan laut max 7 hari	4 hari	5 hari	125%
					3.1.3 Target pendapatan bandara tercapai Rp1,1 Triliyun di tahun 2019	Rp123.584.000.000	Rp172.572.126.662,93	140%
					3.1.4 Waktu pelayanan bongkar muat barang kontainer dan kargo bandara Hang Nadim max 45 menit	30 menit	30 menit	100%
	5 Mewujudkan kawasan investasi yang berwawasan lingkungan	4 Mengembangkan pengelolaan lingkungan hidup dikawasan-kawasan investasi yang berwawasan lingkungan	4.1 Terciptanya kawasan investasi yang sehat dan berwawasan lingkungan		4.1.1 Target pendapatan Rumah Sakit tercapai Rp837 milyar di tahun 2019	Rp95.717.000.000	Rp62.370.419.331,10	65%
					4.1.2 Target pendapatan Kantor Air tercapai Rp365 milyar di 2019	Rp97.744.000.000	Rp30.996.364.208	119%
					4.1.3 Terjaganya kualitas udara dan air yang baik	Minimal Class 5 (Skala 1-6)	Class 5	100%
							Rata-rata capaian kinerja	97%

Tabel 2.3. Alur Visi – Misi – Realisasi 2016

A.6. Program

Untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah sebagaimana diuraikan sebelumnya, Badan Pengusahan Batam menetapkan kebijakan dan program periode 2015—2019 sebagai arah yang akan diambil sesuai dengan misinya. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengusahaan Batam untuk mencapai tujuan dan sasaran, serta akan memperoleh alokasi anggaran.

Program tahun 2016 yang disusun merupakan upaya pencapaian sasaran pada Renstra Tahun 2015—2019 dijabarkan dalam dua program, sebagai berikut

1. Realisasi Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, sebesar **Rp600.198.500.230,70** dengan realisasi indikator *outcome*65,16%darianggaran sebesar Rp921.179.395.000,- yang dialokasikan;
2. Realisasi Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengusahaan Batam, sebesar **Rp816.990.960.619,53** dengan realisasi indikator *outcome* 95,01%dari anggaran sebesar Rp859.921.470.000,- yang dialokasikan;

sehingga total Realisasi Anggaran pada tahun 2016, yaitu sebesar 89,97% dari anggaran sebesar Rp1.781.100.865.000,- yang dialokasikan.

Gambar 2.1. grafik realisasi Anggaran 2016

A.7. Rencana kinerja

Penjabaran dari Renstra BP Batam Tahun 2015—2019 yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (KPBPB Batam). Rencana kinerja BP Batam Tahun 2016 ditetapkan2 (dua) program, 22 (dua puluh dua) kegiatan dalam rangka pencapaian 5 (lima) sasaran yang telah ditetapkan.

Kegiatan pokok (Misi 1)

Memantapkan pengelolaan kawasan investasi yang profesional

Dengan mewujudkan, antara lain

a. Terwujudnya aturan dan regulasi yang berpihak pada pengembangan investasi.

   Dengan indikator kinerja sasaran:

   1. Presentase jaminan kepastian hukum dalam berinvestasi di KPBPB Batam

b. Terwujudnya profesionalitas dalam manajemen pengelolaan yang menerapkan prinsip *good governance* dan *good corporate governance*, dengan indikator kinerja sasaran:

   1. Tersusunnya *road map* reformasi birokrasi di KPBPB Batam;
   2. Persentase peningkatan akuntabilitas kinerja di KPBPB Batam.

Kegiatan pokok (Misi 2)

Mewujudkan kawasan investasi yang memiliki infrastruktur yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

a. Tercapainya target realisasi nilai investasi dari 8 fokus industri.

   Dengan Indikator kinerja sasaran:

   1. Nilai investasi real di 8 fokus industri yang dikembangkan KPBPB Batam tercapai sejumlah 2,9 Milyar USD di tahun 2019,
   2. Waktu pelayanan perijinan investasi 15 hari.

b. Tersedianya sarana prasarana kepelabuhanan yang menghubungkan simpul jasa kawasan investasi yang berstandar internasional.

   Dengan indikator kinerja sasaran:

   1. Target pendapatan pelabuhan laut tercapai Rp1,6 Trilyun di tahun 2019,
   2. Waktu pelayanan bongkar muat barang dan kontainer pelabuhan laut max 7 hari,
   3. Target pendapatan bandara tercapai Rp1,1 Triliyun di tahun 2019,
   4. Waktu pelayanan bongkar muat barang kontainer dan kargo Bandara Hang Nadim max 45 menit.

Kegiatan pokok (Misi 3)

Mewujudkan kawasan investasi yang berwawasan lingkungan

a. Peningkatan pelayanan dibidang perizinan. Dengan indikator kinerja sasaran:

1. Target pendapatan Rumah Sakit tercapai 887 milyar rupiah di tahun 2019,
2. Target pendapatan Kantor Air tercapai 365 milyarrupiah di 2019,
3. Terjaganya kualitas udara dan air yang baik.

Di bawah ini dapat dilihat hubungan antara IKU dan kegiatan-kegiatan yang bertanggung jawab terhadap IKU tersebut

Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Swasta (5118)	15.112.239.000	14.196.086.533	93,94	Kantor Perwakilan Badan Pengusahaan Batam	Tersusunnya *road map* reformasi birokrasi di KPBPB Batam	Persentase peningkatan akuntabilitas kinerja di BP Batam.	2, 3
Penyusunan Perencanaan Teknis Pembangunan (5119)	1.826.490.000	835.966.420	45,75	Biro Perencanaan Teknik	Tersusunnya *road map* reformasi birokrasi di KPBPB Batam	Persentase peningkatan akuntabilitas kinerja di BP Batam.	2, 3
Penyusunan Perencanaan Pengembangan Usaha (5120)	2.846.520.000	1.355.431.400	47,67	Biro Perencanaan Pengembangan Usaha, Pelayanan dan Pentarifan	Tersusunnya *road map* reformasi birokrasi di KPBPB Batam	Persentase peningkatan akuntabilitas kinerja di BP Batam.	2, 3
Penyusunan dan Pengawasan Manajemen Kinerja Organisasi (5121)	1.099.750.000	780.724.485	70,99	Biro Pengembangan Manajemen Kinerja	Tersusunnya *road map* reformasi birokrasi di KPBPB Batam	Persentase peningkatan akuntabilitas kinerja di BP Batam.	2, 3
Pengawasan Akuntabilitas Aparatur dan Kelembagaan (5122)	5.639.780.000	2.794.140.411	49,54	Satuan Pemeriksa Internal	Tersusunnya *road map* reformasi birokrasi di KPBPB Batam	Persentase peningkatan akuntabilitas kinerja di BP Batam.	2, 3
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kawasan PBPB Batam	598.957.463.000	495.497.899.440,70	82,73				

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pertanahan di Kawasan PBPB-Batam (5123)	15.868.060.000	8.493.688.284	53,53	Kantor Pengelolan Lahan	Nilai investasi real di 8 fokus industri yang dikembangkan KPBPB Batam tercapai sejumlah 2.9 Milyar USD di tahun 2019	Waktu pelayanan perijinan investasi 15 hari	4, 5
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pelabuhan Laut (5124)	73.018.080.000	55.606.138.508,40	76,15	Kantor Pelabuhan Laut Batam	Target pendapatan pelabuhan laut tercapai Rp1.6 Trilyun di tahun 2019	Waktu pelayanan bongkar muat barang dan kontainer pelabuhan laut max 7 hari.	6, 7
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Bandar Udara (5125)	189.099.616.000	173.574.967.803,86	91,79	Kantor Bandar Udara Hang Nadim Batam	Target pendapatan bandara tercapai Rp1.1 Triliyun di tahun 2019	Target pendapatan bandara tercapai Rp1.1 Triliyun di tahun 2019	8 , 9
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Fasilitas Kesehatan (5126)	110.207.840.000	58.075.178.577,45	77,20	Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam	Target pendapatan Rumah Sakit tercapai Rp887 milyar di tahun 2019		10
Pengelolaan dan Pengendalian Mutu Prasarana dan Sarana (5127)	20.122.577.000	17.525.457.475	87.09	Direktorat Pembangunan Prasarana dan Sarana	Nilai investasi real di 8 fokus industri yang dikembangkan KPBPB Batam tercapai sejumlah 2.9 Milyar USD di tahun 2019	Waktu pelayanan perijinan investasi 15 hari	4, 5
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Data Centre dan Sistem Informasi (5128)	86.907.329.000	72.873.180.906	83,85	Pusat Pengelolaan Data dan Sistem Informasi	Nilai investasi real di 8 fokus industri yang dikembangkan KPBPB Batam tercapai sejumlah 2.9 Milyar USD di tahun 2019	Waktu pelayanan perijinan investasi 15 hari	4, 5

Pelayanan Lalu Lintas Barang Kawasan PBPB Batam (5129)	2.249.280.000	1.629.732.450	72,46	Direktorat Lalu Lintas Barang	Nilai investasi real di 8 fokus industri yang dikembangkan KPBPB Batam tercapai sejumlah 2,9 Milyar USD di tahun 2019	Waktu pelayanan perijinan investasi 15 hari	4, 5
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Air dan Limbah (5130)	27.346.218.000	24.429.833.750	89,33	Kantor Pengelolaan Air dan Limbah	Target pendapatan Kantor Air tercapai Rp365 milyar di 2019	Terjaganya kualitas udara dan air yang baik	11, 12
Pelayanan Pemasaran dan Kehumasan (5131)	17.114.129.000	11.406.070.229	66,65	Direktorat Promosi dan Hubungan Masyarakat	Nilai investasi real di 8 fokus industri yang dikembangkan KPBPB Batam tercapai sejumlah 2,9 Milyar USD di tahun 2019	Waktu pelayanan perijinan investasi 15 hari	4, 5
Pelayanan Perizinan Terpadu Kawasan PBPB- Batam (5132)	7.101.308.000	6.681.893.918	94,09	Direktorat Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai investasi real di 8 fokus industry yang dikembangkan KPBPB Batam tercapai sejumlah 2,9 Milyar USD di tahun 2019	Waktu pelayanan perijinan investasi 15 hari	4, 5
Pengelolaan dan Pemanfaatan Asset (5133)	33.358.278.000	25.586.187.015	76,10	Direktorat Pemanfaatan Aset	Nilai investasi real di 8 fokus industri yang dikembangkan KPBPB Batam tercapai sejumlah 2,9 Milyar USD di tahun 2019	Waktu pelayanan perijinan investasi 15 hari	4, 5
Pengelolaan Pengamanan Lahan dan Asset Investasi (5134)	16.541.748.000	12.815.550.524	77,47	Direktorat Pengamanan	Nilai investasi real di 8 fokus industri yang dikembangkan KPBPB Batam tercapai sejumlah 2,9 Milyar USD di tahun 2019	Waktu pelayanan perijinan investasi 15 hari	4, 5
JUMLAH	1,438,858,888,000	1,318,488,860,060,23	89,87%				

Tabel 2.4 Hubungan Kegiatan Terhadap IKU

B. Perjanjian Kinerja

Indikator Kinerja Utama dalam Perjanjian Kinerja BP Batam adalah sebagai berikut

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target 2016
1.1	Terwujudnya aturan dan regulasi yang berpihak pada pengembangan investasi	1.1.1	Presentase jaminan kepastian hukum dalam berinvestasi di KPBPB Batam	87
1.2	Terwujudnya profesionalitas dalam manajemen pengelolaan yang menerapkan prinsip *good governance* dan *good corporate governance*	1.2.1	Tersusunnya road map reformasi birokrasi di KPBPB Batam.	100%
		1.2.2	Persentase peningkatan akantabilitas kinerja di BP Batam.	100%
2.1	Tercapainya target realisasi nilai investasi dari 8 fokus industri	2.1.1	Nilai investasi real di 8 fokus industri yang dikembangkan KPBPBBatam tercapai sejumlah 2.9 Milyar USD di tahun 2019	USD 400.000.000
		2.1.2	Waktu pelayanan perijinan investasi 15 hari	4 hari
3.1	Tersedianya sarana prasarana kepelabuhanan yang menghubungkan simpul jasa kawasan investasi yang berstandar internasional	3.1.1	Target pendapatan pelabuhan laut tercapai Rp1.6 Trilyun di tahun 2019	Rp214.050.000.000
		3.1.2	Waktu pelayanan bongkar muat barang dan kontainer pelabuhan laut max 7 hari.	4 hari
		3.1.3	Target pendapatan bandara tercapai Rp1,1 Trilyun di tahun 2019	Rp123.584.000.000
		3.1.4	Waktu pelayanan bongkar muat barang kontainer dan kargo bandara Nang Nadim max 45 menit	30 menit
4.1	Terciptanya kawasan investasi yang sehat dan berwawasan lingkungan	4.1.1	Target pendapatan Rumah Sakit tercapai Rp887 milyar di tahun 2019	Rp95.717.000.000
		4.1.2	Target pendapatan Kantor Air tercapai Rp365 milyar di 2019	Rp27.744.000.000
		4.1.3	Terjaganya kualitas udara dan air yang baik	Minimal Class 3 (Skala 1-4)

Tabel 2.5. Perjanjian Kinerja Tahun 2016

BAB III

Akuntabilitas Kinerja

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja: Capaian Indikator Kinerja Utama

Indikator Pengukuran Kinerja Badan Pengusahaan Batam Tahun 2016 mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun Indikator kinerja yang digunakan terdiri dari indikator kinerja sasaran yang merupakan indikator-indikator tertentu(*outputs* atau *outcomes*) yang paling mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran yang tertuang dalam Renstra BP Batam 2015-2019. Indikator *inputs* adalah semua kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan untuk menghasilkan keluaran, yaitu berupa dana, sumber daya manusia, informasi, dan sebagainya. Indikator *outputs* adalah hasil dari pelaksanaan kegiatan yang dapat dirasakan secara langsung, baik berupa fisik maupun nonfisik. Indikator *outcomes* adalah suatu gambaran dari hasil nyata suatu kegiatan yang dapat dirasakan dan dinikmati oleh lingkungan di sekitarnya.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Hasil evaluasi dan analisis Akuntabilitas Kinerja Badan PengusahaanBatam dilakukan dengan membandingkan rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang diakibatkan oleh realisasi yang berbeda dengan yang direncanakan.

Badan Pengusahaan Batam dalam tahun 2016 telah menetapkan 5 Sasaran Strategis yang ingin dicapai melalui pelaksanaan 2 Program dan 22 Kegiatan, dan secara detail capaian kinerja sasaran diuraikan berikut ini.

Sasaran *Pertama* "Terwujudnya aturan dan regulasi yang berpihak pada pengembangan investasi". Indikator Kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 1(satu) indikator, yaitu

1) Presentase jaminan kepastian hukum dalam berinvestasi di KPBPB Batam.

   Melalui kegiatan Penyusunan Regulasi dan Pelayanan Hukum (5117) telah dikeluarkanperaturan yang menjamin kepastian hukum berinvestasi denganmenganggarkan dana sebesar Rp9.209.806.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp3.721.731.900,- atau penyerapan anggaran hanya 40,41%.

Pencapaian target indikator kinerja tersebut dapat digambarkan sebagai berikut

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET		REALISASI		(%)
1		2		3		4		5
1	Terwujudnya ataran dan regulasi yang berpihak pada pengembangan investasi	1	Presentase jaminan kepastian hukum dalam berinvestasi di KPBPB Batam	37	Dokumen	23	Dokumen	62

Tabel 3.1. Indikator Kinerja Sasaran Ke-1

Dari hasil kegiatan tersebut terlihat dari indikator pertama dapat direalisasikan 62% dari target yang ditetapkan.

Sasaran *Kedua*, Terwujudnya Profesionalitas Dalam Manajemen Pengelolaan yang Menerapkan Prinsip *Good Governance* dan *Good Corporate Governance*. Indikator Kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 2 indikator, yaitu

1) Tersusunnya *road map* reformasi birokrasi di KPBPB Batam,

2) Persentase peningkatan akuntabilitas kinerja di BP Batam.

Pencapaian target indikator kinerja tersebut dapat digambarkan sebagai berikut

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET		REALISASI		(%)
1		2		3		4		5
1	Terwujudnya profesionalitas dalam manajemen pengelolaan yang menerapkan prinsip good governance dan good corporate governance	1	Tersusunnya *granddesign*dan reformasi birokrasi di KPBPB Batam	100	%	0	%	0
		2	Persentase peningkatan akuntabilitas kinerja di BP Batam	100	%	100	%	100

Tabel 3.2. Indikator Kinerja Sasaran ke-2

Dari tabel di atas, terlihat bahwa BP Batam belum melakukan penyusunan *road map* reformasi birokrasi, hal ini dikarenakan belum terlaksananya kegiatan penyusunan *road map* reformasi birokrasi pada tahun 2016 dan kegiatan tersebut dianggarkan pada tahun 2017 sebagai penyusunan *road map* reformasi birokrasi dan diharapkan dapat tersusun pada Tahun Anggaran 2017.

Indikator Persentase peningkatan akuntabilitas kinerja di BP Batam dinilai dari komitmen 22 unit yang ada di BP Batam dalam melaksanakan pelaporan akuntabiltas kinerjanya. Pada tahun 2016 jumlah unit yang telah melaksanakan pelaporan akuntabiltas kinerja sebanyak 22 unit kerja atau dengan realisasi tingkat pelaksanaan sebesar 100%.

Sasaran *Ketiga* Tercapainya Target Realisasi Nilai Investasi dari 8 Fokus Industri. Indikator Kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 2 (dua) indikator, yaitu

1) Nilai investasi real di 8 fokus industri yang dikembangkan KPBPB Batam tercapai sejumlah 2.9 Milyar USD di tahun 2019,
2) Waktu pelayanan perijinan investasi 15 hari.

Pencapaian target indikator kinerja tersebut dapat digambarkan sebagai berikut

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET		REALISASI		(%)
1		2		3		4		5
1	Tercapainya target realisasi nilai investasi dari 8 fokus industri	1	Nilai investasi real di 8 fokus industri yang dikembangkan KPBPBBatam tercapai sejumlah 2.9 Milyar USD di tahun 2019.	400.000.000	USD	471.368.000	USD	118
		2	Waktu pelayanan perijinan investasi 15 hari	4	hari	3	hari	125

Tabel 3.3. Indikator Kinerja Sasaran ke-3

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa indikator kinerja untuk realisasi nilai investasi di 8 fokus industri yang dikembangkan KPBPB Batam adalah sebesar 471.368.000 dolar Amerika Serikat (AS) atau realisasi sebesar 118% dari target nilai investasi yang diharapkan. Jika dilihat dari tahun 2015, maka terjadi peningkatan sebesar 147% dari investasi tahun 2015 sebesar 321.629.400 dollar AS. Artinya, Batam masih diminati menjadi salah satu tujuan investasi.

Untuk indikator waktu pelayanan perijinan investasi yang ada di BP Batam, target waktu pelayanan perijinan investasi paling lama diselesaikan dalam 4 hari, namun pada realisasinya waktu pelayanan perijinan dapat diselesaikan dalam waktu 3 hari atau dengan realisasi sebesar 125%.

Sasaran Keempat, Tersedianya Sarana Prasarana Kepelabuhanan yang Menghubungkan Simpul Jasa Kawasan Investasi yang Berstandar Internasional. Indikator Kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 4 indikator, yaitu:

1) Target pendapatan pelabuhan laut tercapai Rp1,6 Trilyun di tahun 2019,
2) Waktu pelayanan bongkar muat barang dan kontainer pelabuhan laut maksimal 7 hari,
3) Target pendapatan bandara tercapai Rp1,1 Triliyun di tahun 2019,
4) Waktu pelayanan bongkar muat barang kontainer dan kargo bandara Hang Nadim maksimal 45 menit.

Pencapaian target indikator kinerja tersebut digambarkan sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET		REALISASI		(%)
1		2		3		4		5
1	Tersedianya sarana prasarana kepelabuhanan yang menghubungkan simpul jasa kawasan investasi yang berstandar internasional	1	Target pendapatan pelabuhan laut tercapai 1.6 Trilyun di tahun 2019	214.050.000.000	Rp	240.072.427.067,82	Rp	112
		2	Waktu pelayanan bongkar muat barang dan kontainer pelabuhan laut max 7 hari.	4	Hari	3	Hari	125
		3	Target pendapatan bandara tercapai Rp1,1 Trilyun di tahun 2019	123.584.000.000	Rp	172.572.126.662,93	Rp	140
		4	Waktu pelayanan bongkar muat barang kontainer dan kargo bandara Hang Nadim max 45 menit	30	Menit	30	Menit	100

Tabel 3.4. Indikator Kinerja Sasaran ke-4

Indikator pendapatan pelabuhan laut, didapati sebesar Rp240.072.427.067,82 atau dengan realisasi sebesar 112% dari yang semula ditargetkan sebesar Rp214.050.000.000,-.

Indikator waktu pelayanan bongkar muat barang dan kontainer pelabuhan laut, ditargetkan paling lama 4 hari, namun realisasi pelayanan bongkar muat barang dan kontainer pada tahun 2016 selama 3 hari atau Peningkatan waktu layanan sebesar 125%.

Indikator pendapatan Bandara, didapati sebesar Rp172.572.126.662,93 atau dengan realisasi sebesar 140% dari yang semula ditargetkan sebesar Rp123.584.000.000,00

Indikator waktu pelayanan bongkar muat barang kontainer dan kargo bandara Hang Nadim ditargetkan selama 30 menit, dengan realisasi dapat dilayani selama 30 menit, atau dengan besar persentase peningkatan 100%.

Sasaran *Kelima*, Terciptanya Kawasan Investasi yang Sehat dan Berwawasan Lingkungan. Indikator Kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi

1) Target pendapatan Rumah Sakit tercapai 887 milyar rupiah di tahun 2019,

2) Target pendapatan Kantor Air tercapai 365 milyar rupiah di 2019,

3) Terjaganya kualitas udara dan air yang baik.

Pencapaian target indikator kinerja tersebut dapat digambarkan sebagai berikut

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET		REALISASI		(%)
1		2		3		4		5
1	Terciptanya kawasan investasi yang sehat dan berwawasan lingkungan	1	Target pendapatan Rumah Sakit tercapai Rp887 milyar di tahun 2019	95.717.000.000	Rp	62.370.419.831,10	Rp	65
		2	Target pendapatan Kantor Air tercapai Rp365 milyar di 2019	27.744.000.000	Rp	30.996.864.202	Rp	112
		3	Terjaganya kualitas udara dan air yang baik.	Minimal Class 3 (Skala 1-4)	Standar kualitas air dan udara	Class 3	Standar kualitas air dan udara	100

Tabel 3.5. Indikator Kinerja Sasaran Ke-5

Untuk tahun 2016 rumah sakit memperoleh pendapatan sebesar Rp62.370.419.831,10atau65% dari target pendapatanRp95.717.000.000,-.

Indikator Pendapatan Kantor Air dan Limbah, memperoleh pendapatan sebesar Rp 30.996.864.202ataurealisasisebesar112% terhadap target pendapatan yang telah ditetapkan, yakni sebesar Rp27.744.000.000,-.

Indikator terjaganya kualitas udara dan air yang baik didapatkan dari hasil uji kualitas air dan udara, yaitu masuk ke dalam Class 3 dari target Minimal Class 3 (Skala 1-4) dengan realisasi 100%.

Capaian IKU tahun 2016 dapat dilihat pada grafik berikut:

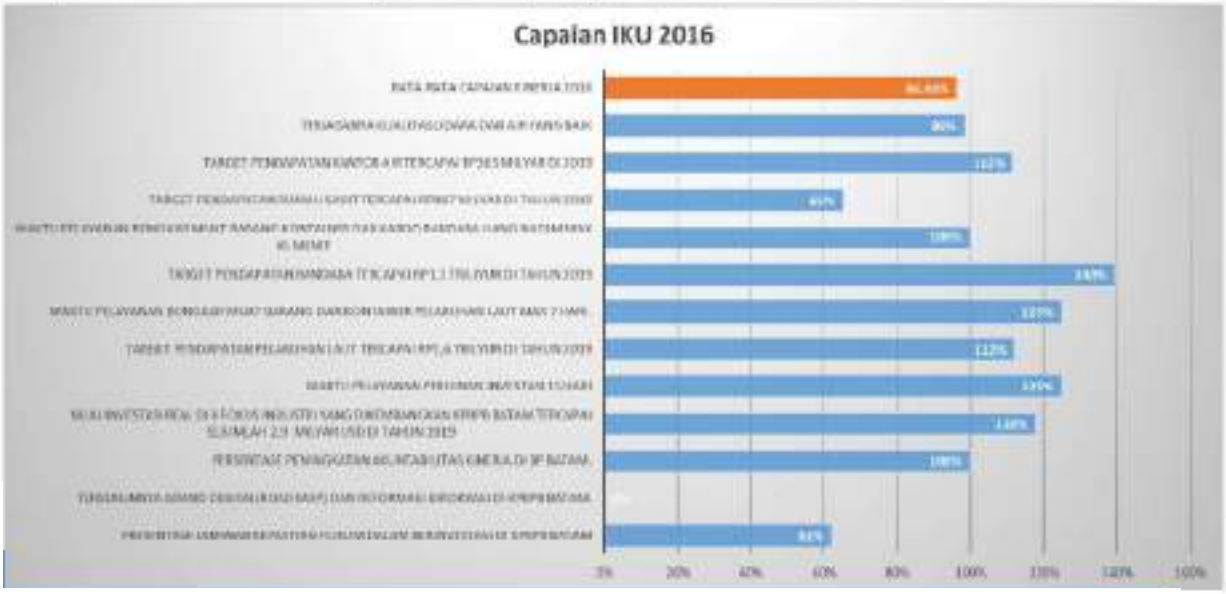

Gambar 3.1. grafik Capaian IKU 2016

A. Analisis Perbandingan Capaian KinerjaTahun 2015dan Tahun 2016

Secara umum dapat dilihat jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2015 dengan capaian sebesar 98% dan pada tahun 2016 sebesar 97%, maka terjadi penurunan kinerja sebesar 1%.

Adapun capaian capaian strategis program pada tahun 2015 dan 2016 dapat terlihat pada tabel berikut :

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Capaian 2015 (%)	Capaian 2016 (%)
1.	Terwujudnya aturan dan regulasi yang berpihak pada pengembangan investasi	1.	Presentase jaminan kepastian hukum dalam berinvestasi di KPBPB Batam	53	62
2.	Terwujudnya profesionalitas dalam manajemen pengelolaan yang menerapkan prinsip good governance dan good corporate governance	2.	Tersusunnya road map reformasi birokrasi di KPBPB Batam.	0	0
		3.	Persentase peningkatan akuntabilitas kinerja di BP Batam.	100	100
3.	Tercapainya target realisasi nilai investasi dari 8 fokus industry	4.	Nilai investasi real di 8 fokus industri yang dikembangkan KPBPB Batam tercapai sejumlah 2.9 Milyar USD di tahun 2019	102	118
		5.	Waktu pelayanan perijinan investasi 15 hari	180	125
4.	Tersedianya sarana prasarana kepelabuhanan yang menghubungkan simpul jasa kawasan investasi yang berstandar internasional	6.	Target pendapatan pelabuhan laut tercapai 1.8 Trilyun di tahun 2019	97	112
		7.	Waktu pelayanan bongkar muat barang dan container pelabuhan laut max 7 hari.	157	125
		8.	Target pendapatan bandara tercapai 1.1 Triliyun di tahun 2019	132	140
		9.	Waktu pelayanan bongkar muat barang container dan cargo bandara hang nadim max 45 menit	100	100
5.	Terciptanya kawasan investasi yang sehat dan berwawasan lingkungan	10.	Target pendapatan Rumah Sakit tercapai 887 milyar di tahun 2019	99	65
		11.	Target pendapatan Kantor Air tercapai 365 milyar di 2019	92	112
		12.	Terjaganya kualitas udara dan air yang baik	85	100
				98	97

Tabel 3.6. Perbandingan Kinerja 2014-2015

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Perbandingan Target dan Realisasi Penerimaan PNBP tahun 2016 dan 2015

Realisasi Penerimaan (PNBP) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Badan Pengusahaan Batam) tahun 2016 adalah sebesar Rp939.301.312.136.36 atau 112.51% dari target sebesar Rp834.869.200.000 dengan rincian per unit sebagai berikut:

No.	Tabel 3.7. Realisasi PNBP 2016		REALISASI	%
A	KANTOR PUSAT	571,714,200,000.00	432,292,203,459.97	116.30%
1	DIREKTORAT PENGELOLAAN LAHAN	330,469,200,000.00	352,015,204,123.34	106.52%
2	KANTOR PDSI	12,176,500,000.00	9,938,356,505.00	81.62%
3	DIREKTORAT LALU LINTAS BARANG	150,000,000.00	89,620,000.00	59.75%
4	BIRO KEUANGAN	9,740,500,000.00	51,885,314,889.63	532.68%
5	DIREKTORAT PEMBANGUNAN SARANA & PRASARANA	3,000,000,000.00	1,786,715,500.00	59.56%
6	DIREKTORAT PEMANFAATAN ASET	16,178,000,000.00	16,576,962,442.00	102.47%
7	UNIT LAINNYA	-	-	0.00%
B	UNIT MANDIRI	463,155,000,000.00	507,008,108,676.39	109.47%
1	KANTOR BANDAR UDARA	123,584,000,000.00	172,572,126,662.93	139.64%
2	KANTOR PELABUHAN LAUT	214,050,000,000.00	240,072,427,067.82	112.16%
3	RUMAH SAKIT	95,717,000,000.00	62,370,419,831.10	65.16%
4	DIREKTORAT AIR & AIR LIMBAH	27,744,000,000.00	30,996,864,202.05	111.72%
5	KANTOR PERWAKILAN JAKARTA	2,060,000,000.00	997,270,912.49	48.41%
	JUMLAH	834,869,200,000.00	939,301,312,136.36	112.51%

Jika dibandingkan dengan Realisasi Penerimaan (PNBP) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Badan Pengusahaan Batam) tahun 2015 adalah sebesar Rp984.778.348.213,00 atau 129,75% dari target sebesar Rp758.972.000.000,00 dengan rincian per unit sebagai berikut:

No	Keterangan	Target	Realisasi	%
I	**Unit Kantor Pusat**	314,976,000,000	514,742,601,415	163.42
1	Direktorat Pengelolaan Lahan	296,172,054,000	452,614,013,981	152.82
2	Biro Umum	3,000,000,000	1,512,904,596	50.43
3	Direktorat KimLing	5,846,911,000	5,526,331,017	94.52
4	PDSI	795,914,000	6,106,049,241	767.17
5	Dir. Lalu Lintas Barang	306,121,000	39,000,000	12.74
6	Biro Keuangan	8,855,000,000	38,974,822,564	440.14
7	Direktorat Pembangunan Sarpras	-	585,370,000	-
8	Direktorat Pemanfaatan Aset	-	9,384,110,016	-
	Jumlah I			
II	**Unit Mandiri**	443,996,000,000	470,035,746,798	105.86
1	Kantor Bandara	113,855,000,000	149,764,572,295	131.54
2	Kantor Pelabuhan Laut	210,855,000,000	204,814,943,449	97.14
3	Rumah Sakit BP Batam	90,245,000,000	89,438,091,619	99.11
4	Direktorat Pengelolaan Air/Limbah	26,541,000,000	24,455,735,355	92.14
5	Kantor Perwakilan Jakarta	2,500,000,000	1,562,404,080	62.50
	Total	758,972,000,000	984,778,348,213	129.75

Tabel 3.8. Realisasi PNBP 2015

2. Perbadingan Realisasi Anggaran 2016 dan 2015

Realisasi penyerapan anggaran Badan Pengusahaan Batam pada tahun 2016 adalah sebesar Rp1,312,488,860,060.23atau mencapai **89,97%** dari anggarannya sebesar Rp1,458,858,933,000

Apabila dibandingkan dengan tahun 2015, kemampuan penyerapan anggaran mengalami sedikit peningkatan dimana realisasi penyerapan anggaran tahun 2015 adalah sebesar Rp1,012,406,494,128,00 atau **81,17%**dari anggarannya sebesar Rp1,247,283,955,000,00.

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU 2016 (Rp)	REALISASI 2016 (Rp)	%
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BP Batam	859.921.470.000	816.990.960.619,35	95,01
Penyusunan Perencanaan Program dan Penelitian Pengembangan (5113)	11.617226.000	7.555.431.488	65,14
Pelayanan Kerumahtanggaan, Kesekretariatan dan Pengadaan Barang/ Jasa (5114)	72.449..020.000	63.425.155.495	87,54
Pengelolaan dan Pelayanan Kepegawaian (5115)	755.957.699.000	738. 445.889.217,30	97,62
Pengelolaan Administrasi Keuangan (5116)	1.116.020.000	4.101.105.352,25	98,44
Penyusunan Regulasi dan Pelayanan Hukum (5117)	9.209.806.000	3.721.751.900	40,41
Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Swasta (5118)	15.112.239.000	14.196.086.353	95,94
Penyusunan Perencanaan Teknis Pembangunan (5119)	1.826.450.000	855.256.420	46,73
Penyusunan Perencanaan Pengembangan Usaha (5120)	2.843.520.000	1.355.431.400	47,67
Penyusunan dan Pengawasan Manajemen Kinerja Organisasi (5121)	1.099.730.000	780.724.425	70,99
Pengawasan Akuntabilitas Aparatur dan Kelembagaan (5122)	5.659.780.000	2.794.140.411	49,54
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kawasan PBPB Batam	598.937.465.000	495.497.899.440,70	82,73
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pertanahan di Kawasan PBPB-Batam (5123)	15.868.060.000	8.493.688.284	53,53
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pelabuhan Laut (5124)	73.018.080.000	55.606.138.108,40	76,15
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Bandar Udara (5125)	189.099.616.000	173.574.967.803,88	91,79
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Fasilitas Kesehatan (5126)	110.207.840.000	58.073.178.577,45	77,20
Pengelolaan dan Pengendalian Mutu Prasarana dan Sarana (5127)	20.122.577.000	17.523.457.475	87.09
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Data Centre dan Sistem Informasi (5128)	86.907.329.000	72.873.150.906	83,83
Pelayanan Lalu Lintas Barang Kawasan PBPB Batam (5129)	2.249.280.000	1.629.752.430	72,46
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Air dan Limbah (5130)	27.349.218.000	24.429.833.750	89,33
Pelayanan Pemasaran dan Kehumasan (5131)	17.114.129.000	11.406.070.229	66,63
Pelayanan Perizinan Terpadu Kawasan PBPB- Batam (5132)	7.101.508..000	6.681.893.918	94,09
Pengelolaan dan Pemanfaatan Asset (5133)	33.558.278.000	25.588.187.015	76,10
Pengelolaan Pengamanan Lahan dan Asset Investasi (5134)	16.341.748.000	12.813.550.324	77,47
JUMLAH	1,458,858,933,000	1,312,488,860,060.23	89.97%

Tabel 3.9. Realisasi Penyerapan Anggaran 2016

BAB IV

Penutup

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan kinerja ini merupakan wujud pertanggungjawaban Badan Pengusahaan Batam terhadap capaian kinerja selama tahun 2016 yang disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara umum berdasarkan sasaran strategis yang ingin dicapai, Badan Pengusahaan menunjukkan kinerja yang baik, meskipun masih terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian.

Melihat hasil yang dicapai pada tahun kerja 2016 dapat disimpulkan bahwa Badan Pengusahaan Batam telah berupaya secara sungguh-sungguh melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik dalam rangka pencapaian Visi dan Misi. Dari 5 (lima) Sasaran Strategis yang ditetapkan, masih terdapat beberapa sasaran yang belum mencapai target kinerja yang diharapkan, namun kinerja keuangan secara umum melebihi dari target yang ditetapkan.

Berdasarkan pengukuran terhadap indikator kinerja sebagaimana yang tertuang dalamperjanjian kinerja Badan Pengusahaan Batam Tahun 2016, menunjukkan capaian sasaran strategis dengan nilai rata-rata capaian sebesar 96% atau baik.

Adapun kendala yang mempengaruhi pencapaian kinerja tahun 2016 disebabkan adanya hambatan eksternal yang dominan dan sangat mempengaruhi capaian kinerja sesuai yang telah direncanakan, misalnyamasih belum diterbitkannya peraturan pemerintah tentang beberapa hal, seperti peraturan pemerintah tentang pembagian tugas yang jelas antara Badan Pengusahaan Batam dengan Pemerintah Kota Batam, dan pembagian tugas di dalam pengelolaan dan penyelenggaraan Pelabuhan Laut dengan Kementerian Perhubungan. Selain itu juga masih lemahnya koordinasi antarlembaga, di samping itu juga keterbatasan anggaran yang dialokasikan.

Sedangkan dari kendala internal yang cukup mempengaruhi capaian kinerja adalah sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan lagi kualitas dan kompetensinya.

B. Saran

Untuk mengatasi semua kendala tersebut agar target pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat tercapai, maka langkah yang akan dilaksanakan pada tahun

kerja 2016, telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2016 BP Batam dan Penetapan Kinerja Tahun 2016. Langkah untuk mengatasi kendala antara lain sebagai berikut

1. Perlu dilakukan koordinasi yang lebih intensif dengan instansi teknis terkait untuk menyeleraskan peraturan dan ketentuan dalam rangka pelaksanaan pembangunan Pulau Batam, seperti harmonisasi hubungan perizinan investasi antara pemerintah daerah, instansi vertikal dan Badan Pengusahaan Batam.
2. Pengelolaan dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia masih harus ditingkatkan lagi, antara lain dengan memberikan kesempatan diklat teknis sesuai kebutuhan di masing-masing.
3. Perlunya regulasi yang mengatur hubungan kerja (antara BP Batam dengan Pemerintah Kota) terkait bidang pariwisata, kehutanan, kelautan dan perikanan, mengingat kegiatan utama pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam ditujukan dalam bidang ekonomi yang meliputi sektor *perdagangan, maritim, industri, perhubungan, perbankan* dan *pariwisata.*

Demikian Laporan Kinerja Badan Pengusahaan Batam Tahun 2016 yang telah disusun, dan diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengusahaan Batam melalui upaya pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Tahun 2016

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam